



**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DAN KECURANGAN TERHADAP
TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN INTERVENING PENGENDALIAN INTERN**

Imran Yunus

Dosen Universitas NUKU

(Naskah diterima: 10 Agustus 2018, disetujui: 22 Oktober 2018)

Abstract

The purpose of this study is the influence of apparatus competence, fraud, internal control on financial governance and apparatus competency, cheating on internal control SKPD of the north Maluku Provincial government, the type of research is explanation. Respondents in this study were financial administrators, technical executives of activities, and treasurers of 43 SKPD expenditure in the North Maluku Provincial government. The data collected is processed with statical methods used to test the hypothesis directly and indirectly the results of the study show that, first the competency of the fraud apparatus, and internal controls affect financial governance, both apparatus competency influence internal control, the three internal controls affect financial governance.

Keywords: *apparatus competence, fraud internal control and financial governance.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah pengaruh kompetensi aparatur, kecurangan, pengendalian intern terhadap tata kelola keuangan dan Kompetensi aparatur, kecurangan terhadap pengendalian intern SKPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara, tipe penelitiannya adalah penjelasan (*explanatory/confirmatory research*). Responden dalam penelitian ini adalah: penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan bendahara pengeluaran di 43 SKPD Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 24.0 dan *Partial Least Square* versi 2.0 M3. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis langsung dan tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama* kompetensi aparatur kecurangan, dan pengendali intern berpengaruh terhadap tata kelola keuangan. *Kedua* kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengendalian intern, *ketiga* kecurangan tidak berpengaruh terhadap pengendalian intern, dan *keempat* pengendalian intern berpengaruh terhadap tata kelola keuangan

Kata Kunci: Kompetensi aparatur, kecurangan, pengendalian intern, dan tata kelola keuangan

I. PENDAHULUAN

Sebuah pemikiran untuk mereformasi dan memikirkan inovasi baru dalam pemerintahan merupakan awal dari lahirnya konsep pemerintahan. Salah satu alat dalam konsep ini adalah pemerintahan yang baik. *Good governance*. Melalui alat ini terbentuk sebuah pemikiran untuk merubah paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi sehingga pengawasan dan spesifikasi pekerjaan dapat lebih mudah dilakukan. Untuk mempermudah menjalan konsep desentralisasi ini maka daerah diberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri melalui otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014. Konsep pemerintahan yang baik atau good governance ini tidak mudah untuk diterapkan, beberapa masalah pun muncul. Salah satu masalah yang sering dihadapi adalah masalah anggaran. Anggaran yang dimaksud disini adalah anggaran publik. Anggaran Publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2005:62).

Timbulnya kecurangan di daerah salah satunya disebabkan lemahnya pengawasan. Sistem pengawasan terdiri atas pengawasan

internal, yaitu pengawasan oleh aparat melalui pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga pengawasan konstitusional, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan DPR. Hubungan antara pengendalian internal dengan masalah kecurangan dalam suatu instansi sangat berkaitan. Dengan adanya pengendalian internal dalam suatu instansi dipercaya dapat dapat bermanfaat untuk membantu suatu instansi mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Dalam Laporan BPK No. 14./LHP/XIX.TER/5/2015.

BPK memberikan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 karena (1) Aset Tetap peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp 38.311.896.071 (2) Pemasalahan harga pada Belanja Modal Peralatan dan mesin sebesar Rp 1. 866.683.696; dan (3) Kelebihan pembayaran pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan sebesar Rp 2.862.709.956.

LKPD yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intrn yang memadai. Sedangkan LKPD mendapat Opini

Tidak Wajar (TW), dan TMP (*disclaimer*) Perlu perbaikan Pengendalian Intern. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan SPI dan pelapora yaitu; (a) Pencatatan belum/ tidak dilakukan secara akurat, (b) Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (c) Terlambat dalam penyampaian laporan keuangan, (d) Sistem Informasi Akuntansi dan pelaporan belum memadai, (e) Sistem Informasi akuntansi dan pelaporan kurang didukung Kompetensi aparatur dengan kedisiplinan ilmu yang dimiliki.

Penelitian ini replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan variabel yang mungkin sama, dengan mengganti sampel atau objek penelitian pada SKPD Provinsi Maluku Utara. Alasan penulis mengangkat judul ini kembali selain untuk menguji kembali konsistensi hasil penelitian terdahulu juga untuk mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang, dengan pengungkapan masalah yang sampai saat ini masih terjadi, dengan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, dalam hal ini peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Kecurangan Terhadap Tata Kelola Keuangan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dengan Intervening Pengendalian Intern.

II. KAJIAN TEORI

Teori keagenan berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi. Teori ini merupakan salah satu yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi perkembangan model akuntansi keuangan dengan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi.

Sebuah kontrak di mana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa bagi kepentingan mereka dengan mendelegasikan be

Fraud auditing atau audit kecurangan adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan *criminal investigator*. Kesalahan dapat terjadi pada tiap tahapan dalam pengelolaan transaksi terjadinya transaksi, dokumentasi, pencatatan dari ayat-ayat jurnal, pencatatan debit kredit, pengiktisaran proses dan hasil laporan keuangan (Arens dkk. 2008).

2.1.1. Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Fraud auditing atau audit kecurangan adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan *criminal investigator*. Kesalahan dapat terjadi pada tiap tahapan dalam pengelolaan transaksi terjadinya transaksi, dokumentasi, pencatatan dari ayat-ayat jurnal, pencatatan debit kredit, pengiktisaran proses dan hasil laporan keuangan (Arens dkk. 2008).

2.1.2. Pengertian Laporan Keuangan

Bastian (2010:297) memaparkan pengertian laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas Sektor Publik.

Weygandt, dan Warfield, (2011:4) mendefinisikan laporan keuangan; *Financial statement are the principal means through which company communicates its financial information to those outside it. The statement provide a companies history qualified in money terms.*

2.1.3. Pengertian Kompetensi Aparatur

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Dalam organisasi publik, peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi SDM pada setiap level manajemen menjadi urgen baik level pimpinan maupun staf pemerintahan.

2.1.4. Pengertian Pengendalian Intern

Herman, (2008) menyimpulkan bahwa kecurangan secara umum disebabkan oleh 3 hal. Hipotesis yang disampaikannya ini dikenal dengan segitiga kecurangan (*Fraud Triangle*). *Fraud Triangle* terdiri dari tiga kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu pendorong (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan sikap/rasionalisasi (*rationalization*). Tuanakotta (2014:101) menyebutkan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) adalah salah satu asosiasi di Amerika Serikat yang kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam 3

kelompok sebagai berikut: (1) Korupsi: Korupsi merupakan suatu tindak kejahatan yang telah merajalela di seluruh wilayah. Di sektor pemerintahan sendiri korupsi telah terjadi di mana-mana dan telah melekat hampir di seluruh sendi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, (2) Penyalahgunaan aset: Penyalahgunaan aset/harta di instansi pemerintah adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset negara atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset negara tersebut untuk kepentingan pribadi, (3) Pernyataan palsu atau salah pernyataan: Pernyataan palsu atau salah pernyataan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

III. METODE PELAKSANAAN

Rancangan penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian mengenai Pengaruh Kompetensi aparatur, dan Kecurangan terhadap Tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah tipe penelitian penjelasan (*explanatory/-*

confirmatory research), karena penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel dengan melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Ekonomi Maluku Utara pada triwulan I 2018 tumbuh melambat dibanding triwulan IV 2017. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2018 tercatat sebesar 7,98% (yoy), tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 8,30% (yoy). Dari sisi permintaan, moderasi pertumbuhan ekonomi triwulan I 2018 didorong oleh melambatnya konsumsi yang berasal dari rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga, dana pemerintah dan kegiatan investasi di Maluku Utara yang lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang merupakan periode akhir tahun dan libur panjang. Sementara dari sisi penawaran, penurunan kinerja beberapa lapangan usaha utama yakni lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, lapangan usaha konstruksi, dan lapangan usaha administrasi pemerintah juga melambat pada triwulan I 2018.

Triwulan II 2018, perekonomian Maluku Utara diperkirakan akan mengalami akselerasi dibanding triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan perekonomian Maluku Utara diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 7,93%-8,33% (yoy). Lapangan usaha yang diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan pada triwulan II 2018 diantaranya adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan dan transportasi. Lapangan usaha pertanian akan tumbuh lebih tinggi dibanding triwulan I 2018.

IV. HASIL PENELITIAN

4.1 Keuangan Pemerintah

Triwulan I 2018, realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp512,72 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 6,70% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pada APBD 2018, terdapat penurunan target anggaran pendapatan, yang terbesar berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 74,01% yang disebabkan turunnya pendapatan hibah.

Analisis sisi pengeluaran, belanja APBD hingga triwulan I 2018 terealisasi sebesar Rp340,34 miliar atau 14,64% dari nilai belanja yang dianggarkan. Realisasi ini lebih besar dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya terealisasi 12,01%. Secara umum, realisasi belanja APBD pada

triwulan I 2018 mengalami peningkatan sebesar 6,94% (yoy).

4.2 Karakteristik Responden

Pengumpulan data dilakukan dengan metode penyampaian langsung kepada responden. Pertimbangan ialah dengan penyampaian langsung hasil yang diperoleh lebih efektif dan wilayahnya masih dapat dijangkau oleh peneliti, sehingga waktu pengembalian kuesioner dapat lebih efisien. Ringkasan jumlah pengiriman dan pengembalian kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Sumber: Data primer diolah, 2018

4.3 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat t-statistik dan *path-coefficient*. Nilai t-statistik menunjukkan signifikansi konstruk, sedangkan *path-coefficient* menunjukkan sifat hubungan antar konstruk (positif atau negatif).

Menggunakan *Partial Least Square* (PLS) versi 2.0 M3 dan dengan penghitungan bootstrapping untuk uji hipotesis. *Bootstrapping* digunakan untuk menguji hipotesis (*number of samples*: 106 dan *cases*: 106) maka didapatkan nilai-nilainya seperti gambar pada gambar 4.2. dan tabel 4.8. berikut.

Untuk lebih mengetahui kerapatan dari hasil pengujian hipotesis, Uji-t dilakukan

pengujian dengan menggunakan signifikansi sebesar 5% atau 0,05 dan 1% atau 0,01. Hipotesis terdukung apabila nilai *t-values* lebih besar daripada nilai *t-tabel*. Nilai *t-tabel* sebesar 1,96 untuk signifikansi sebesar 0,05 sedangkan nilai *t-tabel* sebesar 1,96 untuk signifikansi sebesar 0,01. Koefisien beta (*original sample estimate*) mempunyai nilai positif untuk menjelaskan hubungan antara kedua variabel yang diteliti.

- a. Hubungan antara kompetensi aparatur X_1 dengan tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah signifikan dengan *T-values* sebesar 8,153966 ($>1,96$) dan nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu 0,870753, maka arah hubungan antara kompetensi aparatur dengan tata kelola keuangan adalah positif.
- b. Hubungan antara kecurangan X_2 dengan tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah signifikan dengan *T-values* sebesar 4,725488 ($>1,96$) dan nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu 0,429098, maka arah hubungan antara kecurangan dengan tata kelola keuangan adalah positif.
- c. Hubungan antara kompetensi aparatur X_1 dengan pengendalian intern adalah signifikan dengan *T-statistik* sebesar

8,287442 ($>1,96$) dan nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu 1,015569, maka arah hubungan antara kompetensi aparatur dengan pengendalian intern Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah positif.

- d. Hubungan antara kecurangan X_2 dengan pengendalian intern tidak signifikan dengan *T-values* negatif sebesar 0,987851 ($<1,96$) dan nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu 0,127172, maka arah hubungan antara kecurangan dengan pengendalian intern adalah negatif.
- e. Hubungan antara pengendalian dengan tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah signifikan dengan *T-values* sebesar 4,296339 ($>1,96$) dan nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu 0,448409, maka arah hubungan antara pengendalian intern dengan tata kelola keuangan adalah positif.

Berdasarkan pada beberapa interpretasi yang sudah dipaparkan di atas dan juga berdasarkan pada hasil persamaan tersebut, maka mampu membuktikan bahwa: (1) kompetensi aparatur terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terbukti sesuai dengan hipotesis, (2) kecurangan terhadap tata kelola keuangan

sebagai hipotesis kedua terbukti, 3) kompetensi aparatur terhadap pengendalian intern sebagai hipotesis ketiga terbukti, (4) kecurangan terhadap pengendalian intern dalam penelitian ini tidak mampu menjawab hipotesis keempat, dan (5) pengendalian terhadap tata kelola keuangan terbukti secara statistik, dengan demikian hipotesis kelima dalam penelitian ini terjawab.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dimana penelitian tersebut dilakukan pada SKPD di Provinsi Maluku Utara, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara parsial kompetensi aparatur berpengaruh terhadap tata kelola keuangan SKPD di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
2. Kecurangan berpengaruh terhadap tata kelola keuangan di SKPD Provinsi Maluku Utara.
3. Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pengendalian intern di SKPD Provinsi Maluku Utara
4. Kecurangan tidak berpengaruh terhadap pengendalian intern di SKPD Provinsi Maluku Utara

5. Pengendalian intern berpengaruh terhadap tata kelola keuangan di SKPD Provinsi Maluku Utara
6. Variabel pengendalian intern berfungsi sebagai mediasi secara parsial dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. dan Jogiyanto, H. M. 2009. Konsep Dan Aplikasi Partial Least Square (PLS) Untuk Penelitian Empiris. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UGM, Yogyakarta.
- Adhisty M.C dan Priantinah. D. 2012. Persepsi Karyawan Tentang Peran Auditor Internal sebagai Pengawas, Konsultan Dan Katalisator Dalam Pencapaian Tujuan Perusahaan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Nominal/Volume I Nomor I/Tahun 2012.
- Amalia, Shabrina Rahutami dan Herry Laksito. 2014 Pengaruh Auditor Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Jawa Tengah. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 3, Nomor 2, 1-10.
- Ainsworth M, Smith, S. dan A. Millership. 2002. Managing Performance People. Terjemahan. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Aranta, Petra Zulia. 2013. Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan

- Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto). Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang (tidak dipublikasi).
- Boutler, Nick, Murray Dalziel, Jackie Hill. 1999. *People and Competency, the Route to Competitive Advantage*. Crest Publishing House. New Delhi
- Brown, Evans, J. H., dan Moser, D. V. 2009. Agency Theory and Participative Budgeting Experiments. *Journal Of Management Accounting Research*, 21, 317–345.
- Cheng, Rita H., John H.Engstrom. Susan C. Kattelus, Fall.2002, *Educating Government Financial Managers: University Collaboration Between Business and Public Administration*, *The Journal of Government Financial Management*, Alexandria, 51(3), 10-5.
- Djojohadikusumo, Sumitro 2005. *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Eisenhardt, K. M. 1988. Agency-and Institutional Theory Explanations: The Case of Retail Sales Compensation. *Academy of Management Journal*, 31(3), 488-511.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment And Review. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57-74.
- Gomez-Mejia, L. R., dan Balkin, D. B. 1992. Determinants of Faculty Pay: An Agency Theory Perspective. *Academy of Management Journal*, 35(5), 291-955.
- Govindarajan, V., dan Fisher, J. 1990. Strategy, Control Systems, and Resource Sharing: Effects on Business-Unit Performance. *Academy of Management Journal*, 33(2), 259-285.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hermiyetti. 2008. *Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang*. STEKPI Jakarta (tidak dipublikasi).
- Irwan, D. 2011. *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Bara*. Thesis, pada Program Pascasarjana Universitas Universitas Gajahmada (tidak dipublikasi).
- Kalbers Lawrence. P dan Timhoty J. Fogarty. 1995. *Profesionalism and It's Consequences: A Study of Internal Auditors*. *A Journal of Practice and Theory*. Spring. 14(1), 64-85.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nisak, Chairun., Prasetyono, dan Fitri Ahmad Kurniawan. 2013. *Sistem Pengendalian Intern dalam Pencegahan Fraud pada Satuan Kerja Perangkat*

- Daerah (SKPD) pada Kabupaten Bangkalan. JAFFA, 1(1), 15-22.
- Nur Afiah, Nunuy 2004. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, serta Kualitas Informasi Keuangan Terhadap Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Baik. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (tidak dipublikasi).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 60 tahun 2008. Tentang. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 101 tahun 2000. Tentang. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri.
- Pujiono, Dodik Slamet, Hari Sukarno, Dan Novi Puspitasari. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja pemerintah daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara), Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 10 No. 1, 68-81.
- Purwanti, Sri. 2016. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Manajemen, Penegakan Hukum/Peraturan, Komitmen Organisasi, Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) (Studi Kasus Pada Dinas Kabupaten Kudus), Skripsi (Tidak dipublikasi).
- Purwitasari, Anggit. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi dalam Pencegahan Fraud Pengadaan Barang (Survey pada 5 Rumah Sakit di Bandung). Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung (tidak dipublikasi).
- Puspasari, Novita, dan Meutia Karunia Dewi. 2015. Pengaruh Penalaran Moral Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Tekanan Situasional terhadap Kecenderungan Melakukan Fraud saat Mengaudit: Sebuah Studi Eksperimen. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan.
- Rahayu, Liza, Kennedy, dan Yuneita Anisma. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). JOM FEKON Vol. 1 Nomor. 2.
- Riana, S.D dan Susilawati. 2014. Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal, Star-Study & Accounting Research Vol XI No 1 2014 ISSN: 1693-4482. Riana, S.D dan Susilawati (2014) Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal, Star-Study

- & Accounting Research Vol XI No 1 2014 ISSN: 1693-4482.
- Soleman, Rusman. Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan *Fraud*, JAA Volume 17(1), 57-74.
- Sudiarianti, M.N. 2015 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tesis (tidak dipublikasi).
- Syarifudin, Akhmad. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen). Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, 26-44.
- Syarif, Muqti Randy, Kirmizi, dan Fofika. 2016. Pengaruh Pengendalian internal, Good Governance Peranan Auditor Internal, dan Keadilan Organisasi Terhadap Tingkat Kecurangan (Studi Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu), JOM Fekon Vol.3 No.1.
- Spencer, M. Lyle dan Spencer, M. Signe. 1993. *Competence at Work Modelas for Superior Performance*, John Wily & Son, Inc, New York, USA.
- Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Weygandt, Kieso, D. E., J. J., Dan Warfield, T. D. 2011. *Intermediate. Accounting Volume 1 IFRS Edition*. United States of America : Wiley.